Untuk jumlah aduan per tahun 2024, sudah meningkat yaitu sebanyak 29 laporan . Berikut Tabel Aduan di SP4N Lapor Tahun 2024:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tgl aduan** | **Aduan** | **Disposisi** | **Aduan** | **Tindak Lanjut** | **Keterangan** |
| 1 | 10 Des 2024 | Penyelewengan dana desa | Inspektorat | Kepala desa dan staf desa silungkang duo,kota sawahlunto mengadakan proyek pembangunan jalan dengan anggaran sekitar 7-8 juta rupiah.tetapi dilakukan bergotong - royong bersama linmas,kepala dusun,dan staf2 desa yang ada disana.dengan anggaran yang tidak sampai sebanyak anggaran diatas (7-8 juta). Diketahui oleh oknum masyarakat bahan2 yang dibeli hanya memakan biaya sekitar 3jutaan saja.tolong pihak yang berwajib kantor desa tersebut disidak data anggarannya | Sehubungan dengan Laporan Saudara Husnan Efendi, kami akan melakukan Audit terkait objek yang dilaporkan sekaligus Audit terkait objek yang dilaporkan sekaligus melakukan Audit semua kegiatan tahun 2024 pada Desa Silungkang Duo karena telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025, sesuai jadwal akan dilaksanakan pada Bulan Januari 2025. | Sudah dtindaklanjuti |
| 2 | 3 Des 2024 | Lampu Jalan | Dinas Perhubungan | Meminta penerangan jalan sebanyak 20 titik di desa pasa kubang | Terkait permintaan penambahan PJU sebanyak 20 ttitik di Pasa Kubang melalui mekanisme proses pengadaan. Mengingat minimnya anggaran yang tersedia baru dapat dilaksanakan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Saat ini proses pengadaan titik baru PJU Kota Sawahlunto terutama PJU Pasa Kubang akan kita usulkan dan sampaikan melalui Dana Aspirasi POKIR dan sumber anggaran lain yang dapat disetujui. | Sudah ditindaklanjuti |
| 3 | 19 Nov 2024 | Pembangunan jalan | Dinas PU | Jalan di rt 01 arah kecemara masih rawan di kelurahan durian 1 | Rencana Ruas jalan dari simpang Koramil sampai simpang kuburan sapan masuk kedalam kegiatan DAK ( dana alokasi khusus ) Tahun 2025 jalan ini termasuk kedalam ruas jalan tersebut | Sudah ditindaklanjuti |
| 4 | 19 Nov 2024 | Jalan terban | Dinas PU | Bahu jalan desa rantih turun akibat hujan | Nanti di 2025 kita masukan ke dalam penanganan tanggap darurat | Sudah ditindaklanjuti |
| 5 | 19 Nov 2024 | Perbaikan lampu jalan | Dishub | Mohon untuk pengadaan lampu penerangan jalan di desa silungkang oso khususnya arah jalan menuju kawasan wisata batu runcing | Terima Kasih atas laporannya. Utk Kabel yg putus karna lonsor pohon tumbang sdh diatasi dan beberapa Lampu sdh diperbaiki. Utk arah k Batu Runcing akan kami survey kembali. Insyallah dpt dilakukan pada pengadaan komponen di awal tahun 2025 utk Lampu yg masuk k dalam aset PJU. Mhn maaf atas ketidaknyamanannya | Sudah ditindaklanjuti |
| 6 | 19 Nov 2024 | Pembangunan McK | Dinas PU | Pembangunan mck mushallah ijtihad parik dusun batu kakok desa tumpuk tangah | untuk pembangunan sarana prasarana rumah ibadah seperti MCK kegiatan sebaiknya di usulkan melalui dana HIbah pada bagian Kesra Setdako Sawahlunto . Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 7. | 19 Nov 2024 | Bencana alam | BPBD | Akibat curah hujan yang tinggi dan angin kencang. telah mengakibatkan ruas jalan tumpuk tangah ke datarmansiang tertimbun longsor. sehingga akses jalan saat ini tidak bisa di lalui. untuk penanganan di butuhkan alat berat. | -Terima kasih atas laporannya, akan disurvey oleh TIMRC  -Ternyata laporannya masih laporan hoax. Bencana ini tdk ada terjadi sekarang setelah dikonfirmasi kepada Kepala Desa Tumpuk Tangah. Dimohonkan agar serius dlm membuat laporan. Kalaupun hanya ingin mencoba aplikasi setelah ada pelatihan, agar diawali dengan kata : uji coba aplikasi, tes laporan diaplikasi atau yg lain. Harap dimengerti!!! | Sudah ditindaklanjuti |
| 8 | 19 Nov 2024 | Jalan rusak | Dinas PU | Jalan rusak mulai dari desa sijantang koto, desa batu tanjung, desa datar mansiang sampai dengan desa tumpuk tangah | Tahun ini sedang dilaksanakan perbaikan namun belum selesai keseluruhannya karena anggaran cuma 700 juta bersumber dari Pokir Dewan. Terimah Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 9 | 19 Nov 2024 | Pengadaan lampu jalan | Dishub | Berdasarkan laporan dari ketua rt dan ketua rw terdapat banyaknya lampu penerangan jalan yang mati di kelurahan saringan kecamatan barangin kota sawahlunto | Terima kasih atas laporannya Untuk laporan Kelurahan Saringan telah kami tindaklanjuti sebagian sesuai komponen yang tersedia di tahun 2024. Selanjutnya akan kami survey kembali untuk perbaikan dengan komponen anggaran tahun 2025 untuk aset PJU yang berada di Kelurahan Saringan | Sudah ditindaklanjuti |
| 10 | 19 Nov 2024 | Seringnya PDAM mati | PDAM | Beberapa akhir pekan dan akibat dengan cuaca yang curah hujan tinggi, beberapa kebelakang sering terjadi air dirumah-rumah penduduk mati, khususnya di kelurahan tanah lapang kecamatan lembah segar, seringnya permasalahan ini terjadi dalam 3 sampai 4 hari. tidak adanya antisipasi atau tindakan dengan hal ini yg membuat kebutuhan masyarakat terhambat untuk beraktivitas jalani harinya. | Sudah ditindak lanjuti, IPA Batu Tajam sudah di operasikan stelah perbaikan pipa pleh team distribusi | Sudah ditindaklanjuti |
| 11 | 19 Nov 2024 | Badan jalan amblas | Dinas PU | Badan Jalan amblas akibat curah hujan yang cukup tinggi | Mohon penjelasan Lokasinya jalan amblas dimana ? Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 12 | 19 Nov 2024 | Permohonan jaringan di desa Batu Tanjung | Diskominfo | Di desa batu tanjung terkait jaringan internet yang tidak memadai untuk sekolah dan masyarakat | Kepada Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi, terkait laporan permohonan Tower/Jaringan internet Desa Batu Tanjung kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk sekolah dan Masyarakat belum memadai untuk itu kami akan menyampaikan media internet ada menggunakan beberapa media seperti : 1.BTS (Tower) 2.Kabel Fiber Optick 3.Satelit Berdasarkan 3 media tersebut untuk BTS atau Tower sesuai dengan regulasi yang ada saat ini : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub bidang : 1.Pos dan Telekomunikasi Sub Sub Bidang : Telekomunikasi  Makan berdasarkan regulasi diatas hal ini bukan merupakan kewenangan Kota Sawaaahlunto, melainkan merupakan kewenangan pusat, untuk usulan ke pusat telah dua kali Dinas Kominfo Kota Sawahlunto mengajukan ke Kementrian Kominfo dan Anggota DPRI Bapak Andre Rosiade, akan tetapi hal ini belum kami dapaatkan tindak lanjutnya. 2. untuk media FO, saat ini anggaran pada Dinas Kominfo masih memiliki anggaran fasilitasi internet yang terbatas, belum dapat menfasilitas untuk sampai ke Desa. 3, untuk media satelit, akan kami coba usulkan melalui pokir ke DPRD Provinsi dan DPRD kota Sawaahlunto. Karena untuk saat sekarang masih belum terfasilitasi pada anggaran Dinas Kominfo Kota Sawaahlunto. | Sudah ditindaklanjuti |
| 13 | 19 Nov 2024 | Perbaikan lampu jalan | Dishub | Mohon perbaikan lampu jalan di desa kolok nan tuo karna banyak yang mati..dan kalau malam hari desa gelap gulita | Terima kasih atas laporannya Untuk Kolok Nan Tuo memang banyak lampu yang mati, terlebih pada lokasi kabel yang hilang/dicuri lebih kurang 200 meter. Mohon bantuan dari perangkat Desa untuk dapat mendampingi kami di lapangan. Mohon koordinasinya ke Dinas Perhubungan. | Sudah ditindaklanjuti |
| 14 | 19 Nov 2024 | Laporan bencana alam | BPBD | Bencana alam tanah longsor pada ruas jalan raya kubang lunto di dusun batu tajam desa kubang tangah | Terima kasih atas laporannya. Kami akan tindaklanjuti melalui TRC BPBD. Sebagai saran kedepannya, utk lebih efektifnya laporan yg akan disampaikan terkait bencana yg terjadi, bisa menggunakan saluran komunikasi telpon atau WA. Bisa menghubungi HP tim piket TRC siapa saja yg dikenal, bisa melalui unsur pimpinan BPBD, atau melalui pihak desa/dusun/kelurahan terdekat terlebih dulu. Kemudian kalau bisa mohon dilampirkan foto lokasi dan keadaan bencana yg terjadi. Agar supaya bisa dilakukan tindakan awal oleh TRC dalam persiapan membawa perlengkapan manual atau alat berat. Disamping itu bisa menghubungi saluran media sosial IG BPBD: bpbd.kotasawahlunto. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas laporan yg disampaikan. | Sudah ditindaklanjuti/ uji coba laporan |
| 15 | 19 Nov 2024 | Jalan berlobang | Dinas PU | Jalan raya berlobang di sambungan jembatan dekat masjid agung swl, yang telah sering memakan korban terutama pengendara motor. | Untuk pekerjaan perbaikan akan dilaksanakan secepatnya. Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 16 | 19 Nov 2024 | Permohonan perbaiki jalan | Dinas PU | Dikarenakan bencana tanah bergerarak di dusun mata air desa kubang utara sikabu kecamatan lembah segar kota sawahlunto pada tahun 2018.yang mana telah mengkibatkan jalan terputus di depan ex pukesmas pembantu desa kubang utara sikabu. | Untuk perbaikan jalan dilokasi tersebut membutuhkan biaya yang tinggi , sehingga perbaikan tersebut kita usulkan pembiayaannya melalui dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI melalui OPD BPBD Kota Sawahlunto. Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 17 | 19 Nov 2024 | Kerusakan lampu jalan | Dishub | Lampu jalan yang rusak di desa bukit gadang sudah 2 tahun tidak diperbaiki | Terima kasih atas laporannya Akan kami lakukan survey oleh teknisi. mohon bantuan dari pihak Desa untuk koordinasi kepada kami terhadap titik lokasi yang dimaksud. Untuk perbaikan PJU yang merupakan aset PJU akan dilakukan perbaikan segera. | Sudah ditindaklanjuti |
| 18 | 19 Nov 2024 | Pengadaan puskesmas pembantu | Dinkes | Berhubung sudah ada tanah yang dihibahkan oleh masyarakat desa silungkang tigo dan sudah ada koordinasi dengan puskesmas silungkang dan terkendala dengan anggaran untuk pembangunannya | Yth Bapak/Ibu. Usulan pembangunan Pustu Silungkang Tigo sudah diajukan melalui Dana DAK Tahun 2025, untuk sementara kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Silungkang Tigo untuk memanfaatkan bekas kantor Desa Silungkang Tigo yang berada dekat stasiun kereta api sebagai Puskesmas Pembantu Silungkang Tigo. Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 19 | 19 Nov 2024 | Mohon pembangunan pustu |  | Sehubungan telah layak pakainya puskesmas pembantu yang lama diakibatkan bencana alam. kami dari pemerintah desa kubang utara sikabu memohon bantuan kepada bapak/ibu untuk pembangunan puskesmas pembantu yang baru di desa kubang utara sikabu | Yth Bapak/Ibu, tarkait pembangunan Pustu Kubang Utara Sikabu sudah kami ajukan ke Kementerian melalui dana DAK tahun 2025, akan tetapi belum disetujui Pusat dan kami berupaya mengusulkan kembali melalui dana DAK tahun 2026 atau melalui dana APBD perubahan tahun 2025. Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 20 | 19 Nov 2024 | Penerangan jalan umum | Dishub | Masih kurangnya penerangan jalan di area desa batu tanjung dan sekitarnya. karena mobilisasi masyarakat sudah padat,sehingga akan riskan jika keadaan ini terlalu lama terbengkalai | Untuk pengadaan PJU baru akan kami survey dahulu, hasilnya akan kami usulkan pada pengadaan PJU berikutnya. Mohon feedback dari Desa terkait. Terima Kasih | Sudah ditindaklanjuti |
| 21 | 3 Nov 2024 | Mutasi pegawai | BKPSDM | 1. Nama:ns.arlisna s.kep pangkat/gol:penata tk.i/iii-d jabatan:perawat ahli muda puskesmas asal : puskesmas kampung teleng kota sawahlunto dipindahkan ke puskesmas lunto kota sawahlunto,tanpa ada jabatan yg di pangku (anjab) yg tersedia di puskesmas lunto.dipindahkan ke puskesmas lunto tanpa ada permasalahan di puskesmas kp.teleng,tdk pernah mendapatkan sp baik scr lisan maupun tulisan.tau2 sk pindah keluar.sdgkan tdk pernah memasukan surat pindah kedinas kesehatan,setelah di telusuri ke dinkes,dinkes tdk pernah merekomendasikan utk pindah,krn dinkes tau anjab utk perawat ahli muda di pusk.lunto sdh penuh. surat rekomendasi dari kepala puskesmas kampung teleng ke kepala bkpsdm, tanggal surat rekomendasi hari minggu 13 oktober 2024 bukan hari kerja. tmt sk mutasi 1 oktober 2024, sk diterima 24 oktober 2024. 2. Berdasarkan surat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan RI nomor : PT.01.02/F.VI/1109/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang rekomendasi jabatan fungsional kesehatan, jabatan perawat ahli muda di puskesmas lunto tidak tersedia. Sehingga saya tidak memiliki beban kerja sesuai fungsional saya. | 1. Saudari Ns. Arlisna, S.Kep sedah bertugas di Puskesmas Kapung teleng selama 18 tahun 6 bulan dan dalam rangka kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan mutasi dan rotasi dan ini sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN sebagaimana di ubah terakhir kali dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan peraturan pemerintah no 11 tahan 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 190 ayat 3 menyatakan bahwa mutasi pada sebagaimana ayat 2 dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun 2. Surat Keputusan penempatan yang bersangkutan sudah direvisi kembali. | Sudah ditindaklanjuti |
| 22 | 3 Nov 2024 | Mutasi pegawai | BKPSDM | 1. Nama:ns.salsifitri.s.kep.dipindahkan ke puskesmas kolok secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya .saya merasa tidak punya masalah karena tdk pernah mendapatkan sp dan semua pekerjaan yg ditugaskan saya kerjakan sebaiknya.saya keberatan dipindahkan ke pukms kolok yg pertama anjab saya untuk naik pangkat berikutnya(2025) di puskesmas kolok tidak ada tersedia dan kami tidak pernah mengurus surat pindah ke dinkes setelah kami melapor ke dinkes tidak ada rekomendasi dari dinkes untuk memindahkan km.sudah km klarifikasi jg ke bkpsdm jawabannya surat rekomendasi dari puskesmas ada..dan saya tanyakan apa cukup hanya rekomendasi dari puskms saja apa tdk perlu dari dinkes?..dan dijawab km akan bicarakan dl dg kaban/pak sek..sampai sekarang blm ada informasi. surat rekomendasi puskesmas di agenda surat puskesmas alamat tujuan ke dinas kesehatan, dinas kesehatan tidak menerima surat rekomendasi tersebut. yang membuat surat rekomendasi adalah kepala puskesmas kampung teleng. tanggal surat rekomendasi 13 oktober 2024 bukan hari kerja. tmt sk 1 oktober 2024, sk diterima 24 oktober 2024. rekomendasi pindah 13 oktober 2024. tidak ada sinkronisasi. 2. PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan atau point b tidak ada saya mengusulkan ke Puskesmas Kolok. Point e surat persetujuan dari PPK instansi asal tidak ada . Apakah bisa kepala Puskesmas Langsung mengusulkan rekomendasi mutasi pegawai ke BKPSDM? Apakah tidak perlu Rekomendasi dari Dinas Kesehatan ? Bukankah secara struktur organisasi Puskesmas - Dinas Kesehatan- BKPSDM. Adakah SOP mutasi BKPSDM yang bisa saya pedomani? | 1. Saudari Ns. Salsifitri, S.Kep sedah bertugas di Puskesmas Kapung teleng selama 18 tahun 6 bulan dan dalam rangka kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan mutasi dan rotasi dan ini sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN sebagaimana di ubah terakhir kali dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan peraturan pemerintah no 11 tahan 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 190 ayat 3 menyatakan bahwa mutasi pada sebagaimana ayat 2 dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. 2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Indonesia di luar negeri. Instansi Pemerintah adalah Instasni Pusat dan Instansi Daerah Instansi Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstructural Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat, daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di Pemerintah Kota Sawahlunto adalah Wali Kota Mutasi terdiri dari : 1. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah 2. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi 3. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi 4. Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya 5. Mutasi PNS antar Instansi Pusat 6. Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Negeri  Persyaratan mutasi yang sebagaiamana di sampaikan oleh pelapor adalah persyaratan mutasi untuk mutasi sebagaimana yang tertuang pada angka 2,3,4, 5 dan 6. | Sudah ditindaklanjuti |
| 23 | 1 Nov 2024 | Pembayaran gaji ASN | BPKAD | Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak tahu apakah hal ini berlaku sama disemua instansi pemerintah daerah/provinsi/k/l. saya hanya menyampaikan keresahan dan keluhan saya terkait pembayaran gaji asn di pemerintah kota sawahlunto. jika tanggal 1 jatuh pada hari libur, maka gaji akan masih dihari kerja. jadi kami bisa menerima gaji di tanggal 3 atau 4 bulan berjalan. ini sangat disayangkan sekali. jika tanggal 1 jatuh dihari kerja pun, gaji akan masuk siang atau sore hari dan ini juga meresahkan. bukankah sekarang semuanya serba digital serba non tunai, apakah ini bisa diperbaiki atau memang sistemnya seperti itu. mohon penjelasannya. | Terima kasih atas laporannya. Dapat kami jelaskan bahwa sesuai aturan tentang penggajian ASN diatur bahwa Pembayaran Gaji ASN dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan dengan artian jika hari pertama pada bulan berkenan jatuh pada hari kerja maka gaji akan dibayarkan pada hari tersebut dan jika hari pertama bulan berkenan jatuh pada hari libur maka gaji akan dibayarkan pada hari kerja pertama pada bulan berkenan tersebut. Saat ini kami di BPKAD bekerjasama dengan Bank Nagari dan PUSDATIN Kemendagri sedang berusaha agar pembayaran gaji ini bisa melalui mekanisme SP2D Online sehingga kedepan gaji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto akan bisa kita realisasikan pada tanggal 1 setiap bulannya, terima kasih. | Sudah ditindaklanjuti |
| 24 | 24 Okt 2024 | ASN dan non ASN terlibat kampanye | BKPSDM | Pada perhelatan pilkada serentak tahun 2024 ini, banyak terindikasi tidak netral nya asn dan non asn di pemerintah kota sawahlunto, sudah banyak bukti seperti unggahan di sosial media dan pernyataan - pernyataan yang mendukung salah satu paslon. namun sangat disayangkan bkpsdm selaku pembina kepegawaian tidak tegas dalam hal ini sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kota sawahlunto dalam membina pegawai - pegawainya. | kami telah melakukan sosialisasi dan monitoring dalam rangka pengawasan terhadap netralitas ASN dan non-ASN ke OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Sekaligus kami memberikan penegasan kepada Kepala OPD untuk melakukan penegakan nilai-nilai netralitas ASN dan non-ASN dilingkungan OPD masing-masing. kami juga berkoordinasi dengan Inspektorat dan Bawaslu terkait dengan indikasi pelanggaran netralitas ASN dan non-ASN dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Khusus bagi tenaga non-ASN, penegakan disiplin terkait pelanggaran netralitas merupakan kewenangan penuh dari Kepala OPD tempat yang bersangkutan berdinas, karena pegawai non-ASN diangkat melalui SK Kepala OPD masing-masing. bersama ini kami juga meminta kepada pelapor untuk menyampaikan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh ASN maupun non-ASN, supaya bisa langsung kami tindaklanjuti ataupun kami teruskan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penegakan disiplin. | Sudah ditindaklanjuti |
| 25 | 25 Sep 2024 | Rumah tidak layak huni / hampir roboh | Dinas Perumahan | 1. Mohon disampaikan ke instansi terkait. Ibu heni suryani adalah seorang warga dusun tapian nambar, desa talawi mudik, kec talawi, kota sawahlunto, sumatera barat. Ibu heni bekerja sebagai guru honorer di paud (pagi hari) dan guru ngaji (sore hari). Suami ibu heni bekerja sebagai pekerja di kebun karet milik orang lain dengan penghasilan yang tak menentu (kalau musim hujan tidak bisa bekerja, sehingga tidak memiliki penghasilan). Ibu heni memiliki 2 orang anak yg masih di usia sekolah yaitu sma dan sd. Penghasilan ibu heni dan suami bisa dikatakan pas pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari bahkan terkadang harus ekstra hemat dan satu satunya kebutuhan pokok yang belum terpenuhi oleh ibu heni adalah papan (tempat tinggal). Saat ini ibu heni tinggal di rumah kosong milik bu ita tanpa dipungut biaya sewa (gratis). Dua tahun yang lalu, rencananya rumah bu ita ini mau dirobohkan karena sudah tidak layak huni, dinding dan kayunya lapuk, bocor dimana mana serta sudah dihinggapi rayap. Namun 1 bulan sebelum rumah ini dirobohkan, bu heni datang memohon agar diizinkan untuk menyewa rumah ini. Karena mempertimbangkan kondisi ekonomi bu heni dan melihat kondisi rumah yang tidak layak huni, akhirnya bu ita memberikan izin kepada bu heni untuk tinggal dirumah itu secara gratis. Selama bu heni tinggal di rumah ini, bu heni selalu was was saat hujan lebat dan angin kencang, takut sewaktu waktu rumah ini bisa roboh dan menimpa dirinya dan keluarganya. Bu heni terus bertahan dengan kondisi ini hingga hampir dua tahun menempati rumah ini. Mempertimbangkan kondisi ekonominya bu heni terpaksa harus bertahan di rumah ini karena tidak mampu untuk menyewa rumah kontrakan ataupun membangun rumah baru. Tanggal 16 september 2024 ( tepatnya seminggu yang lalu) atap dapur rumah ini roboh sebagian dan dinding dapur bertambah keropos dimakan rayap dan bertambah bolong. Akibatnya dapur tidak bisa digunakan dan terpaksa memasak di ruangan seadanya (dapur darurat). Semenjak atap dapur sebagian roboh, bu heni tambah was was termasuk bu ita sebagai pemilik rumah juga ikut was was, takut musibah datang secara tiba tiba terhadap bu heni. Ditambah bulan depan memasuki musim hujan. Akhirnya bu ita selaku pemilik rumah beserta tanahnya memberikan izin kepada bu heni untuk membangun rumah semi permanen di lokasi yang sama dengan rumah ini ( rumah lama dirobohkan dulu, kemudian bangun rumah semi permanen yang baru) dan bu heni diizinkan tinggal diatas tanahnya selama bu heni mau secara gratis. Masalahnya saat ini adalah bu heni tidak memiliki biaya untuk membangun rumah yang baru. Permasalahan ini sudah disampaikan bu heni kepada kepala dusun dan kepala desa setempat. Namun menurut kepala dusun dan kepala desa setempat, tidak ada bantuan dana yang bisa dialokasikan untuk membangun rumah semipermanen yang bu heni inginkan. Sampai saat ini bu heni masih berusaha mencari bantuan dana untuk pembangunan rumah semi permanennya, mengingat setiap hari semakin bertambah kerusakan rumah dan musim hujana akan segera tiba. Mohon bantuan disampaikan permasalahan bu heni ini, mungkin ada solusi terbaik agar bu heni terhindar dari musibah tak terduga 2. Artinya program RTLH ini "relevan" atau "tidak relevan" dengan kasus Bu Heni ini???  1. rumah yg ditinggali Bu Heni ini sudah diserahkan oleh pemilik ke Bu Heni (apakah dokumen kepemilikan yg perlu dipenuhi oleh Bu Heni?). 2. bu heni sudah berkeluarga, dari kronologis diatas sudah dijelaskan bahwa bu heni punya suami dan 2 orang anak. 3. Dari kronologis diatas sudah dijelaskan bahwa Bu heni sudah melapor ke dusun dan desa setempat, namun menurut mereka "tidak ada anggaran /program bantuan yang hisa diberikan untuk Bu Heni". 4. Kalau dari dinas perumahan dan dinas sosial tidak bisa membantu, mohon laporan ini dikembalikan ke pemerintah kota dan diteruskan ke Baznas. mengingat disituasi Bu Heni yg sudah darurat dan butuh pertolongan segera. jangan sampai datang musibah dulu, baru bantuan datang. | 1. Dari kronologi dan status pada pemohon, bahwa ybs tinggal menumpang di rumah orang lain,, Untuk program yang relevan dengan DisperkimtanLH adalah Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bencana ataupun peningkatan kualitas.. Untuk ikut program dimaksud sesuai aturan perundangan bahwa program ini adalah bantuan swadaya, artinya harus ada persiapan penerima untuk swadaya perbaikan (bahan/material & tenaga).. Dan harus memenuhi kriteria penerima, pertama ada kejelasan status tanah/kepemilikan atas nama penerima atau dijelaskan dalam surat pernyataan yg disetujui desa, kedua warga Sawahlunto telah berkeluarga, dan perlu ada swadaya... Dan untuk proses dapat bersurat melalui Desa ke dinas, namun perlu dipertimbangankan kriteria yang harus dipenuhi... Apabila program dari dinas ini belum sesuai, kami sarankan untuk pertimbangkan permohonan ke Baznas Kota Sawahlunto 2. Untuk masuk program RTLH di DisperkimtanLH, bisa diajukan dengan surat pengentar dari Desa dengan melampirkan KTP, KK, Foto Rumah, dan surat pernyataan penyerahan status rumah/tanah ke penerima bantuan diketahui Kades.. Apabila surat dan kelengkapan telah kami terima akan kami verifikasi untuk pengusulan anggaran 2025, karena bantuan RTLH tidak bersifat insidentil namun harus direncanakan, kecuali bencana.. Sedangkan untuk bantuan ke Baznas, surat dari Desa dgn lampiran yang sama, sifatnya dapat insidentil atau silahkan datang ke Baznas Kota Sawahlunto.. | Sudah Ditindaklanjuti |
| 26 | 8 Maret 2024 | PDAM tidak lancar | PDAM | Sudah tiga bulan lebih sejak november 2023 jaringan air pdam kota sawahlunto di kelurahan tanah lapang rt 002 rw 001 gang v tidak berfungsi. | Sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke sumber pipa air | Sudah ditindak lanjuti |
| 27 | 23 Feb 2024 | Syarat perpindahan jabatan | BKPSDM | Assalamualaikum bapak/ibu di bkn, saya deni aliansyah, pns di dinas pupr kota sawahlunto, saya berminat pindah jabatan dari jabatan saya sekarang jabatan pelaksana, mau pindah ke jabatan jf ppbj, mohon informasi syarat yang harus saya penuhi untuk mengajukan pindah, terima kasih | untuk perpindahan jabatan pertama kali harus minimal sudah 4 tahun masa kerja dan telah satu kali naik pangkat dari pengangkatan pertama CPNS  Syarat perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional pbj 1. Mengikuti dan lulus uji kompetemsi sesuai standar kompetensi yg telah disusun oleh instansi pembina 2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 2 tahun 3. Memiliki sertifikat dasar 4. Pengangkatan jabatan fungsional pbj melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan fungsional yang akan di duduki. | Sudah ditindaklanjuti |
| 28 | 27 Jan 2024 | Penyelewengan dana bantuan PkH | Dinsos | Perangkat desa ( kepala dusun lubuak kubang) di silungkang oso, kecamatan silungkang, kota sawahlunto telah melakukan penggelapan dana pkh selama 2 tahun. kartu atm para penerima pkh di pegang yg bersangkutan, dan uangnya tidak di serahkan ke penerima pkh. di ambil untuk kepentingan pribadi.mohon di tindak lanjuti dan crosscek lapangan. | Sudah dicrosscek dan diberi peringatan serta hukuman yang setimpal | Sudah ditindaklanjuti |
| 29 | 23 Jan 2024 | Penyerobotan tanah | Dinas Perumahan | Penyerobotan tanah di desa kolok nan tuo kecamatan barangin kota sawahlunto provinsi sumatera barat | Sudah ditindaklanjuti dengan mengunjungi tanah atau daerah yang terjadi penyerobotan lahan tersebut | Sudah ditindaklanjuti |